

**PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KOTA KENDARI**

Oleh : Salahuddin ¹⁾

ABSTRACT

The research aimed to identify the community participation in the implementation of development planning deliberation. The research method used is a combined of methods (mixed methods). The sample interviewed in the quantitative approach was as many as 60 people and informants who were interviewed in-depth qualitative approach as many as 16 people. The results showed that the community participation in the implementation of development planning deliberation have been going well. Implementation of development planning deliberation has met most of the elements of community participation were examined.

Keywords: Community participation, development, planning deliberation,

PENDAHULUAN

Dalam perencanaan pembangunan di daerah, kualitas perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh sejauhmana perencanaan pembangunan tersebut mampu melibatkan partisipasi masyarakat. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, menunjukkan bahwa pemerintah telah menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Keberhasilan proses pembangunan sangat bergantung kepada peranan bersama atau sinergi yang baik antara pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan masyarakatnya. Pemerintah, khususnya pemerintah di daerah dan masyarakatnya akan mampu menciptakan sinergi yang baik dalam keseluruhan proses pembangunan apabila perencanaan pembangunan yang dilakukan mampu melibatkan partisipasi masyarakatnya.

¹⁾ *Staf Pengajar Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo*

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan akan memungkinkan terserapnya aspirasi-aspirasi masyarakat dalam program pembangunan yang dirumuskan sehingga rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan dapat sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakatnya. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan yang direncanakan karena masyarakatlah sendiri yang mempunyai informasi akurat tentang kondisi dan kebutuhannya. Masyarakat akan lebih mempercayai dan terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan jika dilibatkan dalam proses perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk program pembangunan dan mempunyai rasa memiliki terhadap program pembangunan tersebut (Turindra, 2009).

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan merupakan tingkatan yang paling tinggi bila diukur dari derajat keterlibatan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Slamet (1986) bahwa dalam tahap perencanaan pembangunan, masyarakat sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup perumusan tujuan, maksud dan target program pembangunan. Kegiatan perencanaan pembangunan yang tidak dapat melibatkan partisipasi masyarakat akan melahirkan program pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga program pembangunan tersebut mengalami kegagalan.

Berdasarkan konsep musrenbang di atas, dipahami bahwa inti dalam penyelenggaraan musrenbang adalah perlunya partisipasi masyarakat dalam merencanakan program pembangunan kelurahan agar program pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan aspirasi atau kebutuhan daerah (kelurahan) dan masyarakatnya. Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di beberapa kelurahan di Kota Kendari, diungkapkan bahwa perlunya peningkatan kesesuaian aspirasi atau kebutuhan daerah dan masyarakat dengan realisasi program pembangunan (RKPD/ APBD) yang akan

dilaksanakan. Apabila masih terjadi perbedaan kesesuaian aspirasi atau kebutuhan daerah dan masyarakat dengan realisasi program pembangunan (RKPD/APBD) yang akan dilaksanakan secara signifikan maka salah satu faktor yang penting diteliti adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan musrenbang.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan musrenbang khususnya musrenbang kelurahan sangat penting dalam rangka menjamin kesesuaian hasil-hasil penyelenggaraan musrenbang dengan kebutuhan masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan musrenbang khususnya pada penyusunan RKPD tahun 2011 di Kota Kendari ?. Adapun tujuan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan musrenbang khususnya pada penyusunan RKPD tahun 2011 di Kota Kendari.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 di Kota Kendari, yaitu : di Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga, Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua, dan Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga. Informan yang diwawancarai mendalam (*in dept interview*) sebanyak 16 orang (7 orang aparat Bappeda dan PM Kota Kendari, 3 orang kepala kelurahan, dan 6 orang tokoh masyarakat) yang ditentukan secara *purposive*. Responden yang diwawancarai dengan kuisisioner sebanyak 60 orang masyarakat peserta musrenbang yang ditentukan secara *probability stratified random* (Sanapiah, 2001). Sumber data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan kuisisioner (*survey*) dan wawancara mendalam (*in dept interview*) sedangkan data sekunder adalah berbagai dokumen hasil musrenbang yang dikumpulkan.

Metode dasar penelitian ini adalah deskriptif analitis yang dilaksanakan dengan *mixed methods* (Tashakkori dan Teddlie, 2010). Analisa dengan pendekatan kuantitatif digunakan sebagai pendekatan utama dan pendekatan kualitatif sebagai fasilitator. Analisa metode kualitatif digunakan untuk mengembangkan metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini (Alsa, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan musrenbang merupakan partisipasi yang paling strategis dalam upaya mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam program pembangunan. Hal ini karena dalam penyelenggaraan musrenbang, masyarakat dan aparat perencana (SKPD) terlibat menyusun dan menyepakati bersama program pembangunan prioritas di daerah (kelurahan) yang bersangkutan. Selain itu, hasil penyelenggaraan musrenbang ini akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD/APBD. Slamet (1986) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang merupakan tingkatan partisipasi paling tinggi karena dalam penyelenggaraan musrenbang, masyarakat terlibat dalam menentukan tujuan dan target, bahkan terlibat dalam pengambilan keputusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah (kelurahan) yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat masyarakat peserta musrenbang terhadap unsur-unsur partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan musrenbang, yang meliputi : partisipasi masyarakat sebelum, saat, dan setelah penyelenggaraan musrenbang maka hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat tersebut, dapat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Pendapat Masyarakat Peserta tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Musrenbang di Kota Kendari, 2010

Unsur Partisipasi Masyarakat	Skor Tertinggi	Skor Rata-rata Per Kelurahan (%)			Total Rata-rata (%)
		Korumba (n = 20)	Wua-Wua (n = 20)	Baruga (n = 20)	
Sebelum Musrenbang	56	76,61	72,86	74,55	74,67
Saat Musrenbang	60	78,08	71,75	75,17	74,92
Setelah Musrenbang	56	73,39	69,64	68,13	70,39
Total	172	76,03	71,42	72,62	73,33

Sumber : Analisis Data Primer Penelitian, 2010

Tabel 2 menunjukkan bahwa penyelenggaraan musrenbang telah memenuhi sebagian besar unsur-unsur partisipasi masyarakat yang dikaji. Masyarakat peserta musrenbang telah terlibat dengan baik dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan musrenbang terutama pada saat penyelenggaraan musrenbang. Masyarakat peserta musrenbang telah terlibat secara aktif mengidentifikasi dan menyampaikan kepentingannya dalam kegiatan diskusi maupun pengambilan keputusan pada penyelenggaraan musrenbang. Sudirman (2006) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sering diartikan sebagai proses yang melibatkan masyarakat umum pada berbagai kesempatan pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan.

Dilla (2007) mengemukakan teori fungsionalisme yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, bahwa masyarakat memiliki fungsi sosial yang secara teratur mengalami perubahan menuju suatu keseimbangan baru. Masyarakat akan melakukan kegiatan partisipasi terhadap lingkungan sebagai aktualisasi fungsi sosial masyarakat dalam rangka menuju suatu keseimbangan dalam hidup dan kehidupannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan musrenbang (perencanaan pembangunan) bukan saja aktualisasi peran masyarakat dalam mengakomodasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat pada program pembangunan tetapi juga

kepentingan pemerintah kota (aparatur perencana) dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pembuatan program pembangunan (kebijakan publik).

Dalam penelitian ini, baik masyarakat maupun pemerintah kota (aparatur perencana) terlibat secara aktif dalam upaya menyusun dan menyepakati bersama program pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah (kelurahan) bersangkutan. Hal ini karena masyarakat maupun pemerintah kota (aparatur perencana) memiliki kepentingan dan akan mendapatkan manfaat yang sama dalam penyelenggaraan musrenbang. Purwanto (2008) menegaskan bahwa apabila proses pembuatan kebijakan publik (program pembangunan) melibatkan partisipasi masyarakat (publik) maka akan banyak keuntungan yang diperoleh, baik bagi masyarakat maupun pemerintah, yaitu (1) adanya peningkatan kualitas kebijakan publik (program pembangunan); dan (2) pemerintah akan menjadi lebih kuat dalam arti ada peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pembuatan kebijakan yang akan berimplikasi pada peningkatan dukungan publik terhadap pemerintah.

Partisipasi Masyarakat Sebelum Penyelenggaraan Musrenbang

Berdasarkan pendapat masyarakat peserta musrenbang terhadap unsur-unsur partisipasi masyarakat sebelum penyelenggaraan musrenbang maka hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat tersebut, dapat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sebelum penyelenggaraan musrenbang di daerah penelitian ini sudah berjalan dengan baik, terutama pada aspek keikutsertaan masyarakat dalam mensosialisasikan rencana penyelenggaraan musrenbang dan mengidentifikasi permasalahan yang akan disampaikan dalam penyelenggaraan musrenbang. Hal ini karena masyarakat (peserta musrenbang) telah memahami bahwa penyelenggaraan musrenbang ini merupakan kegiatan penting guna mengakomodasikan kepentingan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sehingga

masyarakat harus terlibat dalam berbagai kegiatan sebelum penyelenggaraan musrenbang tersebut.

Tabel 2 Pendapat Masyarakat Peserta tentang Partisipasi Masyarakat Sebelum Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan di Kota Kendari, 2010

Unsur Partisipasi Masyarakat Sebelum Musrenbang	Skor Tertinggi	Skor Rata-rata Per Kelurahan (%)			Total Rata-rata (%)
		Korumba (n = 20)	Wua-Wua (n = 20)	Baruga (n = 20)	
Sosialisasi Kegiatan	20	82,25	77,25	79,00	79,50
Identifikasi Masalah	20	81,75	78,00	80,50	80,08
	16	63,13	60,94	61,56	61,88
Mempelajari Materi					
Total	56	76,61	72,86	74,55	74,67

Sumber : Analisis Data Primer Penelitian, 2010

Apabila masyarakat (peserta musrenbang) telah mendapatkan undangan atau informasi formal dari pemerintah kelurahan, umumnya masyarakat menyampaikan atau mengingatkan perihal rencana kegiatan penyelenggaraan musrenbang kepada masyarakat. Selanjutnya, masyarakat mengidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan yang perlu disampaikan dalam penyelenggaraan musrenbang, baik dengan pengamatan langsung dilapangan atau dengan diskusi melibatkan beberapa anggota masyarakat lainnya. Keadaan tersebut terjadi karena pemerintah kota (aparatur perencana) memberikan ruang/kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan terlibat dalam berbagai kegiatan persiapan penyelenggaraan musrenbang tersebut. Hadjon (1997) menegaskan bahwa konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam program pembangunan, khususnya dalam perencanaan pembangunan.

Adanya keterbukaan atau ruang kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan musrenbang menjadi daya dorong yang kuat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sebelum penyelenggaraan musrenbang, seperti mensosialisasikan rencana kegiatan penyelenggaraan musrenbang dan mengidentifikasi masalah yang akan disampaikan dalam penyelenggaraan musrenbang. Slamet (1986) selanjutnya menjelaskan bahwa kemauan untuk berpartisipasi merupakan kunci utama bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Kemauan partisipasi masyarakat akan tumbuh bila tersedia kesempatan untuk terlibat dalam berbagai program pembangunan khususnya dalam perencanaan pembangunan.

Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat sebelum penyelenggaraan musrenbang pada aspek peran serta masyarakat dalam mempelajari materi yang relevan dengan musrenbang perlu ditingkatkan. Hal ini karena masyarakat mendapatkan materi yang relevan, seperti panduan penyelenggaraan musrenbang, umumnya pada saat penyelenggaraan musrenbang dan biasanya jumlahnya terbatas, sehingga kesempatan untuk mempelajari materi tersebut juga menjadi terbatas. Keadaan ini menyebabkan masyarakat peserta penyelenggaraan musrenbang kurang optimal dalam mempelajari dan memahami materi yang relevan tersebut, yang tentu berguna dalam penyelenggaraan musrenbang.

Partisipasi Masyarakat Saat Penyelenggaraan Musrenbang

Berdasarkan pendapat masyarakat peserta musrenbang terhadap unsur-unsur partisipasi masyarakat saat penyelenggaraan musrenbang maka hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat tersebut, dapat disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Pendapat Masyarakat tentang Partisipasi Masyarakat pada Saat Penyelenggaraan Musrenbang di Kota Kendari, 2010

Unsur Partisipasi Masyarakat Saat Musrenbang	Skor Tertinggi	Skor Rata-rata Per Kelurahan (%)			Total Rata-rata (%)
		Korumba (n = 20)	Wua-Wua (n = 20)	Baruga (n = 20)	
Menyukseskan Kegiatan	20	79,00	76,75	78,75	78,17
Terlibat Diskusi	20	78,50	69,00	73,75	73,75
Terlibat Pengambilan Keputusan	20	76,75	69,50	73,00	73,08
Total	60	78,08	71,75	75,17	74,92

Sumber : Analisis Data Primer Penelitian, 2010

Tabel 3 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada saat penyelenggaraan musrenbang di daerah penelitian telah berjalan dengan baik. Hal ini karena masyarakat telah memiliki kesempatan dan kemampuan untuk terlibat aktif pada berbagai kegiatan pada saat penyelenggaraan musrenbang.

Masyarakat yang menghadiri penyelenggaraan musrenbang di daerah penelitian ini telah mengikuti semua kegiatan dengan seksama. Begitu pula halnya, dalam proses diskusi dan bahkan dalam pengambilan keputusan (kesepakatan) dalam penyelenggaraan musrenbang mengenai program pembangunan yang prioritas, masyarakat sudah terlibat secara aktif menyampaikan aspirasi atau pendapatnya. Kegiatan partisipasi masyarakat tersebut terlaksana dengan baik karena masyarakat telah memiliki kemampuan untuk terlibat aktif dalam berbagai kesempatan pada saat penyelenggaraan musrenbang. Turindra (2009) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan pembangunan khususnya dalam perencanaan pembangunan yang secara aktif dilakukan oleh yang bersangkutan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan

pembangunan khususnya pada saat penyelenggaraan musrenbang merupakan suatu kegiatan masyarakat yang bersifat aktif. Selain bersifat aktif, keterlibatan masyarakat pada kegiatan saat penyelenggaraan musrenbang kelurahan seperti dalam diskusi dan pengambilan keputusan sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk terlibat pada kegiatan-kegiatan tersebut. Slamet (1986) menegaskan bahwa apabila masyarakat telah memiliki kemampuan berpartisipasi maka masyarakat akan mampu terlibat memanfaatkan berbagai kesempatan yang disediakan oleh pemerintah dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan diskusi dan pengambilan keputusan pada penyelenggaraan musrenbang di daerah penelitian ini karena masyarakat (peserta musrenbang) telah memiliki kemampuan menyampaikan pendapat atau aspirasi. Kemampuan menyampaikan pendapat atau aspirasi ini sangat penting dalam menunjang partisipasi masyarakat, khususnya pada saat penyelenggaraan musrenbang, dimana keputusan atau kesepakatan akan diambil atau diputuskan.

Partisipasi Masyarakat Setelah Penyelenggaraan Musrenbang

Berdasarkan pendapat masyarakat peserta musrenbang terhadap unsur-unsur partisipasi masyarakat setelah penyelenggaraan musrenbang maka hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat tersebut, dapat disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat setelah penyelenggaraan musrenbang di daerah penelitian ini telah berjalan dengan baik, terutama pada aspek keikutsertaan masyarakat dalam mensosialisasikan hasil-hasil musrenbang. Partisipasi masyarakat tersebut merupakan peran serta masyarakat dalam mensosialisasikan program pembangunan hasil musrenbang yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sumarto (2003) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat juga merupakan peran serta masyarakat untuk ikut dalam pemantauan program dan kebijakan

pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Tabel 4 Pendapat Masyarakat Peserta tentang Partisipasi Masyarakat Setelah Penyelenggaraan Musrenbang di Kota Kendari, 2010

Unsur Partisipasi Masyarakat Setelah Musrenbang	Skor Tertinggi	Skor Rata-rata Per Kelurahan (%)			Total Rata-rata (%)
		Korumba (n = 20)	Wua-Wua (n = 20)	Baruga (n = 20)	
Sosialisasi Hasil	20	76,75	75,75	75,00	80,33
Pengawasan Hasil	20	68,75	64,00	62,25	64,75
Upaya Lanjutan	16	68,75	65,31	64,06	65,00
Total	56	73,39	69,64	68,13	70,39

Sumber : Analisis Data Primer Penelitian, 2010

Apabila masyarakat (peserta musrenbang) telah selesai mengikuti semua kegiatan penyelenggaraan musrenbang maka masyarakat mensosialisasikan atau menyampaikan hasil yang dicapai dalam musrenbang kepada anggota masyarakat lain yang tidak mengikuti musrenbang dalam berbagai pertemuan seperti pertemuan keluarga. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lainnya dapat mengetahui dan diharapkan ikut mengawasi atau memantau perkembangan hasil musrenbang tersebut.

Aspek peran serta masyarakat dalam mengawasi dan terlibat dalam upaya lanjutan guna merealisasikan hasil-hasil musrenbang pada partisipasi masyarakat setelah penyelenggaraan musrenbang ini perlu ditingkatkan. Hal ini karena umumnya masyarakat kurang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk terlibat dalam mengawasi secara langsung dan terlibat dalam upaya lanjutan untuk merealisasikan hasil-hasil musrenbang. Masyarakat memilih mempercayakan pengawasan dan upaya lanjutan dalam rangka merealisasikan realisasi hasil-hasil musrenbang kepada tim delegasi yang telah dibentuk.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan musrenbang di daerah penelitian ini khususnya musrenbang kelurahan pada penyusunan RKPD Kota Kendari tahun 2011, telah berjalan dengan baik. Hal ini karena penyelenggaraan musrenbang tersebut telah memenuhi sebagian besar unsur-unsur partisipasi masyarakat yang diteliti.
2. Partisipasi masyarakat sebelum penyelenggaraan musrenbang telah berjalan dengan baik dalam hal keterlibatan masyarakat mensosialisasikan rencana kegiatan dan mengidentifikasi permasalahan yang akan disampaikan tetapi masih memiliki kekurangan dalam hal keterlibatan masyarakat mempelajari materi yang relevan dengan musrenbang.
3. Partisipasi masyarakat pada saat penyelenggaraan musrenbang telah berjalan dengan baik, dimana masyarakat telah berperan secara aktif dalam mengikuti dan menyukseskan semua agenda kegiatan, termasuk agenda kegiatan diskusi dan pengambilan keputusan.
4. Partisipasi masyarakat setelah penyelenggaraan musrenbang telah berjalan dengan baik dalam hal keterlibatan masyarakat mensosialisasikan hasil-hasil musrenbang tetapi masih memiliki kekurangan dalam hal keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan upaya lanjutan merealisasikan hasil-hasil musrenbang dalam RKPD (dan APBD).

Implikasi

1. Penelitian ini telah menemukan bahwa penyelenggaraan musrenbang pada kelurahan-kelurahan daerah penelitian ini telah memenuhi unsur-unsur partisipasi masyarakat. Secara akademik, penelitian ini dapat dilanjutkan pada kelurahan-kelurahan lainnya untuk dapat mengungkap partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan musrenbang secara lebih luas, khususnya di Kota Kendari.
2. Secara praktis, Pemerintah Kota Kendari khususnya aparat perencana maupun masyarakat dapat terus meningkatkan partisipasinya dalam penyelenggaraan

musrenbang khususnya musrenbang kelurahan dengan cara terus meningkatkan : (1) penyiapan materi relevan dan pelibatan masyarakat dalam mempelajari materi relevan tersebut sebelum penyelenggaraan musrenbang; dan (2) pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan upaya lanjutan dalam merealisasikan hasil-hasil musrenbang setelah penyelenggaraan musrenbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alsa, Asmadi. 2010. Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bappenas dan Depdagri. 2007. Petunjuk Teknik Penyelenggaraan Musrenbang. Surat Edaran Bersama Menteri Bappenas dan Menteri Dalam Negeri, Jakarta.
- Bappeda dan PM Kota Kendari. 2010. Laporan Akhir Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan RKPD Kota Kendari Tahun 2011. Bappeda dan PM Kota Kendari, Kendari.
- Brannen, Julia. 2005. Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Depdagri, 2008. Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Dilla, Sumadi. 2007. Komunikasi Pembangunan. Pendekatan Terpadu. Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M. 1997. Keterbukaan Pemerintahan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis. Pidato dalam Lustrum III Ubhara Surya, Surabaya.
- Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Purwanto, Erwan Agus. 2008. Pelayanan Publik Partisipatif. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sanapiah, Faisal. 2001. Format-Format Penelitian Sosial. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sesneg, 2004. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Slamet, Margono. 1986. Mahasiswa dalam Pembangunan. Penerbit Universitas Lampung, Lampung.
- Sudirman, 2006. Melegalkan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan. Governance Brief. FH Universitas Jambi, Jambi.
- Sumarto, Hetifah S. 2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Tashakkori, Abbas dan Charles Teddlie. 2010. Mixed Methodology. Mengombinasikan Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif. Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Turindra, Azis. 2009. Partisipasi. <http://turindraatp.wordpress.com>. Diakses tanggal 5 Juli 2010.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. Metodologi Penelitian Sosial. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.